

TPP ASN BELUM BAYAR, PEMPROV JANJI SEGERA REALISASI



Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan akan melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Penegasan ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Suryadi Sabirin kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, merespon desakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku agar segera membayar dua bulan TPP Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekda mengakui, Pemprov Maluku belum melakukan pembayaran atas TPP ASN selama dua bulan terakhir, namun hal tersebut tetap menjadi perhatian serius Pemprov.

Sekda menjelaskan persoalan TPP ASN telah dibahas dalam Rapat bersama DPRD Maluku melalui badan anggaran sehingga telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. “Anggaran untuk TPP ini telah dimasukkan dalam APBD Perubahan yang sudah disetujui oleh DPRD dan pasti akan dibayar,” tegas Sekda. Menurutnya, TPP berbeda dengan gaji dimana gaji wajib dibayarkan tepat setiap bulan berjalan sesuai aturan dan tidak boleh terlambat. Namun TPP dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah, dan Pemprov Maluku tidak akan menutup mata terhadap persoalan TPP yang belum dibayarkan. “Kalau gaji itu kan setiap tanggal 1 dibayarkan tidak pernah terlambat sedangkan untuk TPP kami sesuaikan dengan keadaan keuangan daerah,” terangnya. Kendati begitu, Sekda meminta ASN untuk bersabar dan dalam waktu dekat telah dibayarkan TPP yang belum diselesaikan

Dewan Minta

Sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Maluku meminta Pemprov Maluku untuk segera menyelesaikan pembayaran (TPP) ASN. Pasalnya, ASN di lingkungan Pemprov Maluku belum mendapatkan TPP selama dua bulan terakhir yakni Agustus dan September. Sekretaris Komisi I

DPRD Provinsi Maluku, Michael Tasaney mengaku telah mendengar keluhan terkait dengan TPP ASN yang belum dibayar oleh Pemprov Maluku. “Laporan yang masuk ke Komisi I memang TPP untuk bulan Agustus dan September ini belum dibayarkan, makanya kita minta Pemprov untuk menyelesaikan persoalan ini,” pinta Michael Tasaney saat diwawancarai Siwalima melalui telepon seluler.

Persoalan TPP telah dibicarakan dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan Tahun 2024 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Maluku. DPRD Maluku sepakat semua bentuk hak ASN yang dijamin oleh aturan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk diselesaikan. “Memang TPP ini berbeda dengan gaji yang wajib cair di tanggal 1 setiap bulan berjalan tetapi, setidaknya TPP ini juga harus diperhatikan Pemprov,” tegas Michael Tasaney. Michael Tasaney juga berharap jika Anggaran TPP telah tersedia maka harus dilakukan pembayaran setiap bulan berjalan agar tidak menjadi masalah.

Sumber Berita:

Harian Siwalima “TPP ASN Belum Bayar, Pemprov Janji Segera Realisasi”, 18 September 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 Ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.